

IMIGRASI SULTRA DAN BINDA SULTRA PERKUAT PENGAWASAN TPPO DAN TPPM



KENDARI, 6 April 2026 – Bertempat di Kantor Binda Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara melakukan pertemuan koordinasi dengan Kepala Binda (Kabinda) Sulawesi Tenggara beserta stakeholder terkait. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi intelijen dan pengawasan lapangan dalam menjaga kedaulatan wilayah di Bumi Anoa.

Pembahasan dalam pertemuan tersebut berfokus pada penguatan strategi pencegahan dan penindakan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) serta Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Mengingat kompleksitas kejahatan transnasional, kolaborasi antara Imigrasi, Binda, dan stakeholder terkait menjadi faktor penting dalam pertukaran data intelijen yang akurat serta deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara.



Langkah strategis ini merupakan implementasi dari salah satu Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, yang menekankan penguatan pengawasan pada titik-titik rawan guna menutup ruang bagi sindikat kriminal yang mengeksploitasi warga negara maupun memanfaatkan jalur perbatasan.

Melalui semangat kebersamaan dan koordinasi lintas sektoral, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan keimigrasian. Dukungan dari Binda Sulawesi Tenggara beserta stakeholder terkait diharapkan semakin memperkuat pengawasan orang asing serta perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) agar berjalan lebih optimal dan responsif.

KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA IKUTI PENGARAHAN DIRJEN IMIGRASI SECARA DARING

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, bersama jajaran pejabat mengikuti kegiatan Zoom Meeting pengarahan dari Direktur Jenderal Imigrasi yang baru, Hendarsam Marantoko.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya penyelarasan arah kebijakan serta penguatan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di seluruh wilayah. Dalam arahannya, Dirjen Imigrasi menekankan pentingnya peningkatan profesionalisme, integritas, serta optimalisasi pelayanan publik yang responsif dan adaptif terhadap dinamika perkembangan.



Partisipasi aktif Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen untuk terus mendukung kebijakan strategis pimpinan serta meningkatkan kualitas kinerja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.



JAGA KEDAULATAN DI TITIK WISATA, IMIGRASI SULTRA SISIR KEBERADAAN WNA DI PULAU LABENGKI



KENDARI – Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan ketat terhadap warga negara asing (WNA) Kali ini, tim diterjunkan langsung untuk menggelar Operasi Mandiri Keimigrasian di wilayah Kabupaten Konawe Utara, khususnya di kawasan wisata Pulau Labengki.

Operasi yang berlangsung mulai tanggal 4 hingga 7 April 2026 ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap WNA yang berada di wilayah tersebut mematuhi aturan hukum yang berlaku. Langkah ini juga menjadi upaya deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian di tengah dinamisnya mobilitas penduduk dan investasi di Konawe Utara

Pemeriksaan Dokumen Wisatawan

Selama kegiatan berlangsung, tim mengunjungi sejumlah destinasi strategis, termasuk Labengki Nirwana Resort dan Labengki Beach Hut. Di lokasi-lokasi tersebut, petugas melakukan verifikasi administrasi dan dokumen perjalanan terhadap wisatawan asing.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tim mendata beberapa WNA asal Jepang dan China yang sedang melakukan aktivitas wisata bahari seperti menyelam (diving). Dari hasil pengecekan secara persuasif, seluruh wisatawan tersebut diketahui memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah serta masih berlaku.

Edukasi Aplikasi APOA bagi Pengelola Resort

Selain memeriksa dokumen WNA, petugas juga menyoroti kepatuhan pengelola penginapan dalam melaporkan keberadaan tamu asing melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

Dalam temuan di lapangan, tim mendapati masih adanya manajemen resort yang belum memahami prosedur penggunaan aplikasi tersebut. Merespons hal ini, petugas langsung memberikan sosialisasi di tempat (on-the-spot) dan asistensi teknis mengenai tata cara pendaftaran akun serta alur pelaporan data tamu asing.

"Pihak pengelola kini memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dan berkomitmen untuk mengintegrasikan pelaporan mandiri melalui APOA ke dalam prosedur standar operasional (SOP) mereka," tulis laporan kegiatan tersebut.



Sinergi dan Rekomendasi Masa Depan

Ketua Tim, Sasmita, menekankan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antara instansi pemerintah dengan pelaku usaha pariwisata. Penguatan koordinasi dengan Dinas Pariwisata dan pihak kepolisian (Polairud) dianggap sangat krusial untuk memantau pergerakan alat angkut asing, seperti kapal pesiar (yacht), yang sering singgah di perairan Labengki.

Kehadiran fisik petugas di destinasi wisata terpencil ini diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman bagi wisatawan, tetapi juga menegaskan kedaulatan negara di wilayah perbatasan dan kepulauan.

PERKUAT FUNGSI PENGAWASAN, IMIGRASI SULTRA GELAR PATROLI KEIMIGRASIAN TERPADU DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

.....



Sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan fungsi intelijen dan penindakan keimigrasian, Imigrasi Sultra kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan negara melalui kegiatan patroli lapangan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Kegiatan ini dirancang sebagai langkah preventif sekaligus deteksi dini untuk memastikan bahwa keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di sektor industri dan pariwisata, berjalan sepenuhnya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Perjalanan patroli kali ini difokuskan pada sektor industri strategis dengan menyambangi PT. Jaya Makmur Metal Industri dan PT. Sofi Ruby Privatindo. Di kedua lokasi tersebut, Tim melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap dokumen keimigrasian serta izin tinggal para tenaga kerja asing untuk memastikan bahwa aktivitas mereka selaras dengan izin yang diberikan oleh negara. Pendekatan ini diambil tidak hanya sebagai bentuk pengawasan ketat, tetapi juga sebagai upaya edukasi bagi pihak korporasi agar senantiasa tertib dalam menjalankan kewajiban administratifnya demi iklim investasi yang sehat dan legal.



Selain menyasar sektor korporasi, tim juga menyadari pentingnya sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah. Oleh karena itu, Tim melakukan kunjungan koordinasi ke Polsek Moramo Utara guna memperkuat jejaring informasi dan kolaborasi pengawasan orang asing di tingkat kewilayahan. Melalui pertukaran data yang intensif ini, diharapkan setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi lebih awal secara bersama-sama.



Sebagai penutup dari rangkaian kegiatan di Konawe Selatan, tim bergerak menuju Green Hotel untuk memantau kepatuhan pengelola penginapan dalam melaporkan keberadaan tamu asing melalui aplikasi pelaporan yang tersedia. Pengawasan pada sektor akomodasi ini menjadi krusial untuk melengkapi basis data pergerakan orang asing secara akurat. Dengan berakhirnya rangkaian patroli ini, Imigrasi Sultra menegaskan bahwa pengawasan yang berkesinambungan dan kolaboratif adalah kunci utama dalam menciptakan ketertiban keimigrasian yang harmonis di seluruh pelosok Sulawesi Tenggara.

PERKUAT SINERGI, KANWIL DITJENIM SULTRA KOORDINASI LAYANAN IZIN TINGGAL DI KOLAKA TIMUR

KOLAKA TIMUR – Dalam upaya mengoptimalkan pengawasan dan pelayanan keimigrasian di wilayah Sulawesi Tenggara, Tim Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara melaksanakan rangkaian koordinasi lapangan di Kabupaten Kolaka Timur pada 6 hingga 7 April 2026.



Kegiatan ini berfokus pada penguatan koordinasi di bidang Izin Tinggal Keimigrasian guna memastikan administrasi dan keberadaan warga negara asing (WNA) di wilayah tersebut berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Rangkaian Koordinasi Lintas Sektor
Selama dua hari masa penugasan, tim menyambangi tiga instansi strategis di Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur:

- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol): Koordinasi dilakukan untuk mensinkronkan data pemantauan orang asing demi menjaga stabilitas keamanan daerah.

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil): Fokus pembahasan meliputi integrasi data kependudukan bagi pemegang izin tinggal tetap serta pengawasan terhadap status kewarganegaraan.

- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans): Pertemuan ini bertujuan memperketat pengawasan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) agar sejalan dengan izin tinggal yang dikantongi.



Optimalkan Pengawasan dan Pelayanan

Perwakilan Tim Kanwil Imigrasi Sultra menyampaikan bahwa kolaborasi ini sangat penting mengingat Kabupaten Kolaka Timur merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi aktivitas orang asing, baik di sektor perkebunan maupun industri lainnya.

"Koordinasi ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan langkah preventif untuk memastikan bahwa setiap warga asing di Kolaka Timur memiliki dokumen yang sah dan mematuhi aturan izin tinggal yang berlaku," ujar Hidayat selaku ketua tim di sela kegiatan.

Pihak Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyambut baik inisiatif ini dan berkomitmen untuk terus berbagi informasi terkait keberadaan orang asing melalui wadah Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA). Melalui langkah ini, diharapkan tercipta iklim investasi dan aktivitas sosial yang kondusif namun tetap dalam koridor hukum keimigrasian.

PERKUAT PENGAWASAN ORANG ASING, IMIGRASI SULTRA BANGUN SINERGI STRATEGIS DI BOMBANA



Bombana, 07 April 2026 - Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara melalui Tim Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian melaksanakan kegiatan koordinasi di Kabupaten Bombana.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengunjungi Komando Distrik Militer (Kodim) 1431 Bombana serta Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bombana. Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat pengawasan terhadap orang asing serta memastikan tertib administrasi keimigrasian di wilayah Kabupaten Bombana.

Melalui kolaborasi yang solid antarinstansi, diharapkan pengawasan keimigrasian dapat berjalan lebih optimal serta mampu mendukung stabilitas keamanan dan ketertiban di daerah.



AKSELERASI KINERJA, KAKANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA PERKUAT BENTENG WAKATOBI DARI ANCAMAN TPPO/TPPM

WAKATOBI - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, melakukan kunjungan kerja resmi ke Kantor Bupati Wakatobi pada Rabu 08 April 2026. Kedatangan Kakanwil disambut langsung oleh Bupati Wakatobi, H. Haliana, S.E.

Pertemuan formal ini memfokuskan pada inisiasi pembentukan Desa Binaan Imigrasi sebagai langkah konkret dalam memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Langkah ini merupakan penerapan dari 15 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.



Wakatobi Jadi Prioritas Pengawasan

Dalam diskusi yang berlangsung di Ruang Kerja Bupati tersebut, Ganda Samosir memaparkan pentingnya kolaborasi antara Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra dengan Pemerintah Kabupaten Wakatobi. Mengingat Wakatobi merupakan wilayah kepulauan strategis, risiko pengiriman tenaga kerja non-prosedural dan kejahatan transnasional menjadi perhatian utama.

"Kami membawa misi 15 Program Akselerasi Menteri untuk memastikan fungsi perlindungan imigrasi hadir hingga ke pelosok desa. Melalui Desa Binaan Imigrasi, kami ingin mengedukasi masyarakat Wakatobi agar tidak menjadi korban sindikat TPPO dan TPPM. Negara harus hadir memberikan literasi hukum yang kuat di pintu-pintu gerbang maritim kita," tegas Ganda Samosir.

Apresiasi dan Dukungan Bupati Haliana

Bupati Wakatobi, H. Haliana, S.E., menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif yang dibawa oleh jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra. Ia menilai keberadaan Desa Binaan Imigrasi sangat krusial bagi keselamatan warga Wakatobi yang memiliki mobilitas tinggi ke luar negeri.

Optimalisasi Tim Pora

Selain Desa Binaan, pertemuan di Kantor Bupati ini juga menyepakati optimalisasi Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora). Mengingat Wakatobi adalah destinasi wisata internasional, pengawasan terhadap orang asing akan ditingkatkan secara humanis namun tetap tegas guna menjaga keamanan dan ketertiban nasional.

Sinergi antara Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra dan Pemkab Wakatobi ini diharapkan menjadi model percontohan bagi wilayah kepulauan lainnya di Sulawesi Tenggara dalam membangun ekosistem keamanan yang stabil dan pelayanan publik yang unggul.



AKSELERASI PROGRAM MENTERI IMIPAS, KAKANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA PERKUAT PENGAWASAN DESA MELALUI COFFEE MORNING DI WAKATOBI



WAKATOBI – Sebagai bentuk komitmen nyata dalam menjalankan 15 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, menggelar kegiatan Coffee Morning bertajuk “Gelorakan Desa Binaan Imigrasi”. Kegiatan ini dilangsungkan dengan suasana dialogis di Kantor Desa Sombu, Wakatobi.

Hadir mendampingi Kakanwil dalam giat tersebut, Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi, Khairil Amsal, beserta jajaran. Pertemuan strategis ini diikuti oleh Kepala Desa Sombu, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari Desa Wapia-pia dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa).

Implementasi Pimpasa dalam Pencegahan TPPO/TPPM

Kegiatan ini merupakan implementasi langsung dari poin ke-4 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan, yaitu optimalisasi peran Pimpasa dalam memberikan penyuluhan hukum keimigrasian guna mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Dalam arahnya, Ganda Samosir menegaskan bahwa Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra berkomitmen untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat. "Melalui peran Pimpasa, kita ingin memastikan desa-desa di Wakatobi memiliki ketahanan terhadap bujuk rayu sindikat TPPO/TPPM. Penguatan literasi ini adalah langkah preventif agar warga kita terlindungi saat hendak bekerja ke luar negeri sesuai prosedur yang benar," tegas Ganda.

Pengawasan WNA Berbasis Komunitas

Selain isu perlindungan WNI, forum ini juga menyoroti pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah pedesaan. Kakanim Wakatobi, Khairil Amsal, mengajak perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk aktif dalam skema pelaporan keberadaan orang asing.

Sinergi Informasi: Membangun komunikasi dua arah antara warga dan petugas Pimpasa terkait aktivitas orang asing yang mencurigakan.

Keamanan Wilayah: Memastikan setiap WNA di Wakatobi mematuhi aturan izin tinggal demi menjaga ketertiban umum dan keamanan nasional.



Menuju Desa Sadar Imigrasi

Kehadiran perwakilan Desa Wapia-pia dan personel Pimpasa dalam diskusi ini menunjukkan semangat kolaborasi lintas sektoral. Kakanwil berharap Desa Sombu dapat menjadi pelopor bagi desa-desa lain di Sulawesi Tenggara dalam membangun ekosistem desa yang sadar hukum keimigrasian.

"Imigrasi sekarang telah berdiri sendiri melalui Kanwil Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara. Transformasi ini kami barengi dengan peningkatan layanan dan pengawasan yang lebih intensif hingga ke tingkat desa, demi menyukseskan visi besar Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan," pungkas Ganda Samosir.

Melalui giat Coffee Morning ini, diharapkan sinergi antara jajaran Kanwil Ditjen Imigrasi Sultra dan perangkat desa semakin solid dalam menjaga kedaulatan serta melindungi kepentingan masyarakat di Bumi Sultra.

PERKUAT GARDA DI GERBANG WISATA: KOMITMEN IMIGRASI SULTRA OPTIMALKAN LAYANAN IMIGRASI WAKATOBI

.....



Wakatobi – Dalam upaya memastikan standar pelayanan publik tetap berada di jalur terbaiknya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sulawesi Tenggara, Ganda Samosir, melaksanakan agenda strategis Monitoring dan Evaluasi di Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi.

Pertemuan yang berlangsung khidmat ini memfokuskan pembahasan pada pilar utama layanan keimigrasian, yakni Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian. Di hadapan jajaran Kanim Wakatobi, Kakanwil menekankan bahwa integritas bukan sekadar slogan, melainkan praktik nyata dalam setiap proses penerbitan paspor maupun pengawasan warga negara asing.

Wakatobi sebagai destinasi wisata kelas dunia menuntut kesiapan petugas imigrasi yang cekatan dan solutif. Melalui kegiatan Monev ini, dilakukan peninjauan mendalam terhadap SOP guna meminimalisir kendala teknis dan birokrasi yang berbelit.



Langkah ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Imigrasi Sultra untuk terus bertransformasi menuju birokrasi yang lebih modern, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.



TIM KANWIL DITJEN IMIGRASI SULTRA PERKUAT KOORDINASI DOKUMEN PERJALANAN DI KONAWE SELATAN



KONAWE SELATAN – Dalam upaya meningkatkan akurasi data dan kualitas pelayanan paspor bagi masyarakat, tim dari Kantor Wilayah Ditjen Sulawesi Tenggara, melaksanakan kegiatan koordinasi terkait Dokumen Perjalanan Republik Indonesia di Kabupaten Konawe Selatan, Kamis (09/04).

Kegiatan ini bertujuan untuk menyinkronkan prosedur serta memastikan validitas dokumen kependudukan yang menjadi syarat utama dalam pengurusan dokumen perjalanan, khususnya bagi calon jemaah haji dan masyarakat umum di wilayah tersebut.

Sinergi Lintas Instansi

Tim mengawali koordinasi di Kantor Kementerian Agama dan Kantor Kementerian Haji Kabupaten Konawe Selatan. Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada persiapan dokumen perjalanan bagi para calon jemaah haji musim mendatang. Koordinasi ini penting untuk memastikan bahwa data pada paspor nantinya selaras dengan data pendaftaran haji guna menghindari kendala saat proses pemindaian visa maupun pemeriksaan di pintu imigrasi.

Selanjutnya, tim bergeser ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Konawe Selatan. Fokus utama dalam kunjungan ini adalah penguatan validasi data pemohon dokumen perjalanan.

"Koordinasi ini merupakan langkah preventif untuk meminimalisir adanya pemalsuan data atau tumpang tindih identitas. Kami ingin memastikan bahwa setiap Dokumen Perjalanan RI yang diterbitkan memiliki basis data kependudukan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Hidayat selaku ketua tim Kanwil Sultra.

Komitmen Pelayanan Prima

Pihak Disdukcapil Konawe Selatan menyambut baik inisiatif ini dan berkomitmen untuk terus mendukung imigrasi dalam hal verifikasi data administrasi kependudukan (Adminduk) secara cepat dan tepat.

Dengan adanya koordinasi berkala ini, diharapkan masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan dapat menikmati layanan keimigrasian yang lebih transparan, aman, dan efisien. Langkah kolaboratif ini juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan keimigrasian dalam menjaga kedaulatan negara melalui penertiban dokumen perjalanan.